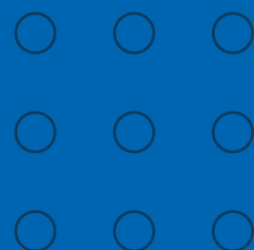


Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Pasuruan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKJIP 2023



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2023 telah disusun sesuai rencana, guna memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2023.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kerjanya, sehingga dokumen LKJIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kerjanya.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKJIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan para pelaksana kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu,

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKJIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah untuk mewujudkan visi – misi Pemerintah Kota Pasuruan.

Demikian semoga dokumen LKJIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023 dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Aamiin .

Pasuruan, Februari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA PASURUAN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan kinerja di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2023. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah yang pada laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan memiliki peran strategis dalam pembangunan TIK, menyediakan infrastruktur TIK, pengelolaan data dan statistik secara sektoral, keamanan informasi dan persandian serta menyebarkan informasi di Kota Pasuruan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam Tahun 2023 dengan alat ukur 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum kinerja dapat berhasil dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Tujuan 1** : Integrasi digitalisasi pada pelayanan publik.
Indikator : Persentase aplikasi yang terintegrasi, target Tahun 2023 50% sedangkan realisasi di Tahun 2023 38,46% sehingga capaian di Tahun 2023 76,92%.
- 2. Sasaran 1** : Meningkatnya system tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima.
Indikator : Nilai SAKIP SKPD, target Tahun 2023 70 sedangkan realisasi di Tahun 2023 70,61 sehingga capaian di Tahun 2023 100,87%.
Indikator : Persentase temuan annggaran yang ditindaklanjuti, target Tahun 2023 100% sedangkan realisasi di Tahun 2023 100% sehingga capaian di Tahun 2023 100%.
Indikator : Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD, target Tahun 2023 80 sedangkan realisasi di Tahun 2023 272,36% sehingga capaian di Tahun 2023 340,45%.
- 3. Sasaran 2** : Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik.

Indikator : Indeks keterbukaan informasi publik, target Tahun 2023 70 sedangkan realisasi di Tahun 2023 39,90% sehingga capaian di Tahun 2023 57%.

4. Sasaran 3 : Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indikator 1 : Indeks tata kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE, target Tahun 2023 2,7 sedangkan realisasi di Tahun 2023 2,90 sehingga capaian di Tahun 2023 107,41%.

Indikator 2 : Indeks layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE, target Tahun 2023 2,7 sedangkan realisasi di Tahun 2023 4,38 sehingga capaian di Tahun 2023 162,22%.

5. Sasaran 4 : Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan.

Indikator : Persentase data statistik yang terintegrasi, target Tahun 2023 65 sedangkan realisasi di Tahun 2023 83,72% sehingga capaian di Tahun 2023 18,8%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	1
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1
1.2.2 Anggaran	2
1.2.3 Isu Strategis	3
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	6
2.2 Rencana Kinerja Tahun n	8
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja	21
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	21
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	21
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	25
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	27
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	29
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	32

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	36
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	37
3.2 Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP.....	47
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun n-1 (2022) dan Tahun n (2023)	2
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	6
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan	7
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan	8
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2023	9
Tabel 2.5	Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan	10
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2023	14
Tabel 2.7	Perubahan Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan	16
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	21
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023	21
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Th 2023 dengan Tahun Sebelumnya	25
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	27
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/ Kota.....	29
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	33
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	36
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	38
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu : Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama tahun 2023 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana pengukuran dan evaluasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan sebagai tolak ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informasi dan bidang statistik. Untuk mencapai hasil (*outcome*) yang optimal, maka program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dianggarkan melalui P-APBD/APBD Tahun 2023.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dalam Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, serta bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

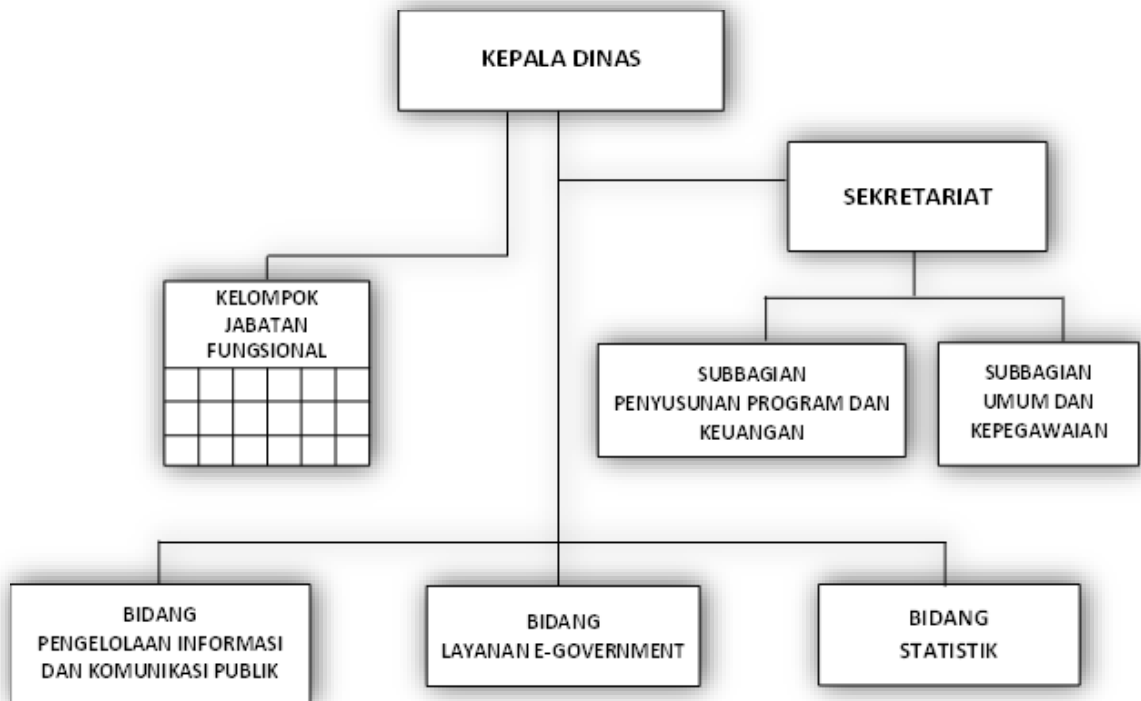
Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan

f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan



Sumber : Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2022

1.2.2 Anggaran

Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2023 bersumber dari APBD Kota Pasuruan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp22.389.389.193. Akan tetapi terdapat perubahan anggaran pada bulan September, sehingga jumlah pagu anggaran menjadi Rp22.396.767.978. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun kemarin, terdapat peningkatan anggaran sebesar Rp4.018.361.793 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 (2022) dan Tahun n (2023)

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2022	Rp18.378.406.185
APBD	2023	Rp22.396.767.978

Sumber : DPPA 2022 dan DPPA 2023

1.2.3 Isu Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan melaksanakan pengelolaan teknologi informasi yang meliputi telekomunikasi, dunia penyiaran (broadcasting) dan internet. Saat ini teknologi informasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga dalam rentang waktu 2021-2026 perlu diprioritaskan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi agar masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam memanfaatkan dunia digital. Permasalahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah :

1. Belum optimalnya layanan informasi publik;
2. Kurangnya ketersediaan data Statistik Sektoral;
3. Belum optimalnya implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan publikasi kegiatan pemerintah daerah pada media cetak, media elektronik dan media sosial;
2. Peningkatan cakupan terintegrasi data sektoral untuk penyusunan statistik pembangunan;
3. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi di seluruh perangkat daerah.

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan disusun dengan landasan hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengalami perubahan dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
11. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, serta bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

1.4 Sistematis Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

DAFTAR LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Melalui formulasi rumusan tujuan dalam Rencana Strategis, maka Diskominfo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah / perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Program Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan memiliki keterkaitan erat dengan pertanggungjawaban pencapaiannya. Tujuan yang dirumuskan harus computable agar upaya pertanggungjawabannya dapat tercapai secara obyektif dan terukur.

Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2016 – 2021. Untuk tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tujuan 1 Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Persentase Aplikasi yang Terintegrasi	30%	50%	65%	70%	90%
	Sasaran 1 Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	60	70	80	80	90
	Sasaran 2 Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %
	Sasaran 3 Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,60	2,70	2,80	2,85	2,90
		Indeks layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,60	2,70	2,80	2,85	2,90

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Adapun Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	1.1	Persentase aplikasi yang terintegrasi	%	Merupakan persentase aplikasi yang terintegrasi	= Jumlah aplikasi terintegrasi/ jumlah aplikasi yang direncanakan untuk integrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Bidang Layanan e-Government
2.	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	2.1	Nilai SAKIP SKPD	Poin	Merupakan hasil dari penilaian SAKIP oleh Inspektorat	= Nilai SAKIP SKPD	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		2.2	Persentase temuan Anggaran yang ditindaklanjuti	%	Merupakan persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	= temuan Anggaran yang ditindaklanjuti/temuan anggaran	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		2.3	Persentase Rata-rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	%	Merupakan persentase ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran Perangkat Daerah	= Jumlah realisasi ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD/Program dukungan sasaran SKPD	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	2.1	Indeks keterbukaan informasi publik	poin	Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;	nilai indeks keterbukaan informasi publik	Kemendagri
4.	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	3.1	Persentase data statistik yang terintegrasi	%	Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan	= Jumlah data statistik yang terintegrasi/ jumlah data statistik	Perangkat daerah
5.	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem	4.1	Indeks tata kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	poin	Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian	Nilai Indeks tata kelola SPBE tahun-n	Kemenpan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			dalam penerapan SPBE secara terpadu		
		4.2	Indeks layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	poin	Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat	Nilai Indeks Layanan SPBE tahun - n

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2023

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	Poin	70
		Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	%	65
		Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	Poin	2,7
			Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	Poin	2,7

Sumber : Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2023

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Sebagai wujud pernyataan komitmen atau tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, maka rencana kinerja tahunan ditetapkan sebagai penetapan Perangkat Daerah dengan rumusan program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan dibuatnya Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Dalam Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2023, secara rinci pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai PMPRB	70 poin
2.	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP SKPD	70 poin
		Persentase temuan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Rata-rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	80%
3.	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	50%
4.	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik.	Indeks keterbukaan informasi publik	70 poin
5.	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,7 poin
		Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,7 poin
6.	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	65%

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2023

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.370.149.634
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp 4.820.244.473
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 11.723.630.686
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 358.144.480
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 117.219.920

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan yang didukung oleh APBD Pemerintah Kota sebesar Rp22.389.389.193,- yang dituangkan pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	80	5.370.149.634
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	80	31.126.360
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	11.570.800
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	3.503.180
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	5.038.780
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	11.013.600
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	80	4.306.251.250

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	34	4.202.776.990
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	2	97.483.500
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	2	5.990.760
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	70	47.733.680
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	47.733.680
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	70	56.237.740
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	14.425.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	2	29.142.740
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	1	12.670.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	85	107.483.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	9.707.900
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	7	16.111.400
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	2.947.500
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	10.339.600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	68.377.100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	85	131.986.200

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	28	111.456.100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	5	20.530.100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	85	274.435.550
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	3	4.540.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	135.558.200
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	134.337.350
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	70	414.895.354
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	40.610.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	13	144.013.354
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang terpelihara	jenis	60	45.440.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	buah	1	174.832.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	10.000.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi PD yang di unggah	%	70	4.820.244.473
		Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media	%	90	
		Persentase informasi berbasis masyarakat yang dibina	%	85	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat waktu	%	75	4.820.244.473
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	16	508.838.913

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen	7	460.389.260
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	layanan	3	3.268.374.300
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	dokumen	5	582.642.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi	%	10	11.723.630.686
		Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti	%	100	
		Persentase pengamanan informasi dan dokumen publik	%	85	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan kerusakan jaringan internet dan server yang ditindaklanjuti sesuai SOP	%	75	10.570.146.846
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	188	10.570.146.846
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	%	75	1.153.483.840
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	unit	20	984.681.560
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	2	168.802.280
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase layanan keamanan informasi dan persandian	%	6	117.219.920
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah	aplikasi	6	117.219.920
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	PD	41	117.219.920
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang di publikasi	%	70	358.144.480

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Data Pokok Pembangunan daerah	OPD	33	358.144.480
		Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Profil Pembangunan daerah	OPD	33	
		Persentase data statistik sektoral yang diunggah di website	%	60	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen	2	308.144.620
	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	orang	80	49.999.860

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 29 bulan September tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan terjadi perubahan anggaran kegiatan dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	50%	50%
2.		Nilai SAKIP SKPD	70 poin	70 poin

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase temuan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%
		Persentase Rata-rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	80%	80%
3.	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik.	Indeks keterbukaan informasi publik	70 poin	70 poin
4.	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,7 poin	2,7 poin
		Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,7 poin	2,7 poin
5.	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	65%	65%

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2023

Program

Anggaran

		Sebelum	Sesudah
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.370.149.634	Rp 5.514.738.199
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp 4.820.244.473	Rp 4.706.843.799
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 11.723.630.686	Rp 11.721.112.580
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 358.144.480	Rp 345.144.480
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 117.219.920	Rp 108.928.920

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan 5

(lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan yang didukung oleh APBD Pemerintah Kota sebesar Rp22.396.767.978,- yang dituangkan pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Perubahan Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	80	5.514.738.199
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	%	80	31.126.360
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	11.570.800
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	3.503.180
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	5.038.780
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	11.013.600
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	%	80	4.393.310.315
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	4.316.324.055
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	2	70.995.500
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	2	5.990.760

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	%	70	10.581.680
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	10.581.680
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	%	70	56.237.740
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	14.425.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	2	29.142.740
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	1	12.670.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	%	85	219.562.600
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	9.707.900
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	7	16.111.400
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2	2.947.500
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	10.339.600
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	210	180.456.200
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	%	85	131.986.200
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	jenis	28	111.456.100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	jenis	5	20.530.100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	85	270.577.950
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	3	4.540.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	127.870.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	138.167.950
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	70	401.355.354
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	40.610.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	14	147.663.354
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang terpelihara	jenis	58	38.250.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	buah	1	174.832.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	0	0
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi PD yang di unggah	%	70	4.706.843.799
		Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media	%	90	
		Persentase informasi berbasis masyarakat yang dibina	%	85	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat waktu	%	75	4.706.843.799

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	16	521.039.339
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen	7	460.389.260
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	layanan	3	3.327.773.200
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	dokumen	5	397.642.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi	%	10	11.721.112.580
		Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti	%	100	
		Persentase pengamanan informasi dan dokumen publik	%	85	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan kerusakan jaringan internet dan server yang ditindaklanjuti sesuai SOP	%	75	10.813.853.681
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	224	10.813.853.681
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	%	75	907.258.899
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	unit	20	748.452.419
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	2	158.806.480
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase layanan keamanan informasi dan persandian	%	6	108.928.920

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah	aplikasi	6	108.928.920
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	PD	41	108.928.920
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang di publikasi	%	70	345.144.480
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Data Pokok Pembangunan daerah	OPD	33	345.144.480
		Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Profil Pembangunan daerah	OPD	33	
		Persentase data statistik sektoral yang diunggah di website	%	60	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen	2	308.144.620
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	orang	80	36.999.860	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	50%	38,46%	76,92%	Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP SKPD	70	70,61	100,87%	Sangat Tinggi	Inspektorat
		Persentase temuan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Inspektorat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase Rata-rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	80%	272,36%	340,45%	Sangat Tinggi	Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	70	39,90	57	Rendah	Kemendagri
4.	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,7	2,90	107,41	Sangat Tinggi	Kemenpan RB
		Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,7	4,38	162,22	Sangat Tinggi	Kemenpan RB
5.	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	65	83,72	128,8	Sangat Tinggi	Perangkat Daerah

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

1. Tujuan “Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik”

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	50%	38,46%	76,92%

Integrasi digitalisasi pada pelayanan publik bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, murah dan sederhana. Dalam hal ini, Dinas Kominfotik akan menertibkan aplikasi perangkat daerah yang tidak dalam pengelolaan server Dinas Kominfotik. Tahun 2023 semua aplikasi yang dimiliki perangkat daerah sudah terpusat pada

server Dinas Kominfo. Sehingga langkah ini dapat mempermudah dalam proses integrasi aplikasi.

Dengan adanya integrasi digitalisasi, masyarakat tidak harus menginstall banyak aplikasi, tetapi hanya butuh 1 aplikasi untuk berbagai layanan. Masyarakat dapat mengakses layanan dimanapun dan kapanpun melalui 1 aplikasi. Pada tahun 2023 telah tercapai sebesar 76,92% (dalam kategori tinggi). Hasil capaian ini didapatkan dari jumlah aplikasi yang terintegrasi dibandingkan dengan jumlah aplikasi yang direncanakan untuk integrasi.

2. Sasaran “Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima”

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Nilai SAKIP SKPD	70	70,61	100,87%
2	Persentase temuan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3	Persentase Rata-rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	80%	272,36%	340,45%

Sasaran meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima terdiri dari beberapa indikator yang mendukung program sasaran strategis SKPD. Indikator tersebut adalah nilai SAKIP, persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti, dan persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan SKPD. Rata-rata ketercapaian 3 indikator tersebut di atas 100% (dalam kategori sangat tinggi).

Indikator nilai SAKIP tercapai 100,87% berdasarkan laporan hasil evaluasi penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Pada tahun 2023 Dinas Kominfo tidak ada temuan anggaran. Sehingga untuk indikator persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti tercapai 100%. Sedangkan indikator persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD sebesar 340,45%. Capaian ini diperoleh dari perbandingan tingkat capaian program-program Dinas Kominfo dengan jumlah indikator semua program.

3. Sasaran “Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik”

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	70	39,90	57

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 10/SK/KI-Prov.Jatim/XI/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, realisasi kinerja atas indikator indeks

keterbukaan informasi publik sebesar 39,90 dengan kategori tidak informatif. Sehingga capaian indikator tersebut sebesar 57% dari target 70.

4. Sasaran “Indeks maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,7	2,90	107,41
2	Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,7	4,38	162,22

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 107,41% (dalam kategori sangat tinggi) dan 162,22 (dalam kategori sangat tinggi). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Adapun dasar hukum SPBE adalah Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang evaluasinya mengacu pada Permenpan 5 Tahun 2018.

Pencapaian ini dikarenakan Nilai Indeks SPBE, indeks tersebut menggambarkan tingkat kematangan (Maturity Level) dari pelaksanaan SPBE. Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan memiliki target Indeks Tata Kelola SPBE sebesar 2,7 point dan dengan capaian realisasi sebesar 2,90 point. Sedangkan nilai target indikator Indeks Layanan SPBE Tahun 2023 sebesar 2,7 point dan dengan capaian realisasi sebesar 4,38 point. Ketercapaian tersebut dikarenakan adanya kebijakan internal SPBE serta tersedianya masterplan SPBE Kota Pasuruan. Selain itu, komitmen pimpinan dalam penerapan SPBE di Kota Pasuruan.

5. Sasaran “Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan”

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Persentase data statistik yang terintegrasi	65%	83,72%	128,8

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar : 128,8% (dalam kategori sangat berhasil). Capaian ini berdasarkan jumlah elemen sebanyak 1630 dan telah terintegrasi sebanyak 1947 elemen data.

Pencapaian ini dikarenakan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD) akan data-data indikator sebagai bahan dalam penyusunan suatu perencanaan atau kebijakan.

3.1.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau Tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	-	36,53	50%	38,46%	76,92
2.	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP SKPD	60,57	61,66	70	70,61	100,87
		Persentase temuan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Rata-rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	97,66	369,61	80%	272,36%	340,45%
3.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	32,11	43,87	70	39,9	57
4.	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	1,4	2,00	2,7	2,90	107,41
		Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,37	3,43	2,7	4,38	162,22
5.	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	84,84	65,09	65	83,72	128,8

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Rata-rata pencapaian indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan pada Tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

Pada tahun ini Dinas Kominfotik fokus dalam pengembangan aplikasi, sehingga Persentase integrasi digitalisasi di Tahun 2023 hanya meningkat 1,93% dengan capaian sebesar 76,92%. Pada tahun sebelumnya, aplikasi yang sudah diintegrasikan sebanyak 19 aplikasi dan tahun ini ada 1 aplikasi lagi. Sehingga total aplikasi yang sudah diintegrasikan sebanyak 20 aplikasi.

Sasaran meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima memiliki 3 indikator. Untuk indikator nilai SAKIP dan persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai SAKIP Diskominfotik pada Tahun 2022 adalah 61,66 dengan kategori "B" dan Pada Tahun 2023 meningkat menjadi 70,61 dengan kategori "BB". Hal ini disebabkan karena kesinambungan antara dokumen perencanaan dan dokumen laporan evaluasi. Dan untuk indikator persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti dari tahun ke tahun selalu 100%. Hal tersebut merupakan komitmen Diskominfotik dalam mewujudkan lingkungan bebas korupsi. Sedangkan untuk indikator persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD mengalami penurunan sebesar 97,25% karena adanya nilai 2 indikator yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai indeks keterbukaan informasi publik menurun menjadi 39,90 dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai sebesar 43,87. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan pimpinan Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sehingga menghambat penyediaan informasi publik.

Sedangkan nilai indeks tata Kelola dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Tahun 2023 meningkat menjadi 2,90 dan 4,38 dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai sebesar 2,00 dan 3,43. Hal ini disebabkan oleh pemenuhan indikator indeks SPBE yang sesuai.

Persentase data statistik yang terintegrasikan pada tahun ini telah memenuhi target Tahun 2023 dengan nilai capaian sebesar 128,8%. Hal ini disebabkan oleh tingginya kesadaran perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan terkait pentingnya data statistik sektoral untuk mewujudkan Satu Data Pembangunan Kota Pasuruan.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Persentase Aplikasi yang Terintegrasi	38,46	90	42,73
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP SKPD	70,61	70	100,87
		Persentase temuan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100	100
		Persentase Rata-rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	272,36%	95	286,69
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	39,90	90	44,33
4	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,90	2,90	100
		Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	4,38	2,90	151,03
5	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	83,72	80	104,65

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 ada 1 Tujuan, 3 sasaran utama dengan 4 indikator dan 1 sasaran penunjang dengan 3 indikator yaitu :

1. Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik

Integrasi digitalisasi pada pelayanan publik merupakan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dengan indikator persentase aplikasi yang terintegrasi. Aplikasi terintegrasi dapat mempermudah dan mempercepat pengguna dalam mengakses berbagai aplikasi layanan pemerintah. Pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2021-2026 di targetkan terealisasi sebesar 90%. Dengan target aplikasi yang direncanakan untuk integrasi sebanyak 52 aplikasi. Persentase aplikasi yang terintegrasi pada tahun ini sebesar 38,46% atau sebanyak 20 aplikasi. Dengan perolehan tersebut, tingkat kemajuan indikator adalah 42,73%. Sehingga kurang 47,27% dalam pemenuhan indikator sampai dengan akhir rencana strategis Tahun 2026.

2. Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima

Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima merupakan sasaran penunjang rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan 2021-2026. Ada 3 indikator penunjang yang mendukung keberhasilan rencana strategis. Ketiga indikator tersebut adalah indikator nilai SAKIP, persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti, dan persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD. Berdasarkan tabel 3.4 nilai ketiga indikator tersebut telah mencapai target akhir rencana strategis Diskominfo. Namun dibutuhkan konsistensi sampai dengan akhir tahun rencana strategis agar nilai indikator mencapai target.

3. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik

Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik merupakan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dengan indikator Indeks keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 nilai indeks keterbukaan informasi publik ditargetkan sebesar 90 poin. Pada Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan mendapatkan nilai indeks keterbukaan informasi publik sebesar 39,90 poin. Dengan perolehan nilai tersebut, tingkat capaian indikator menurun sebesar 44,33%. Sehingga kurang 55,67% dalam pemenuhan indikator sampai dengan akhir rencana strategis Tahun 2026.

4. Meningkatkan Maturitas Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dengan indikator Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE dan Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE. Indeks SPBE merupakan nilai capaian pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 nilai Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE dan Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE ditargetkan sebesar 2,90 poin. Pada Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan mendapatkan nilai Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE sebesar 2,90 dan Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE sebesar 4,38 poin. Dengan perolehan nilai tersebut, tingkat kemajuan indikator ini adalah 100% dan 151,03%. Sehingga pemenuhan indikator sampai dengan akhir rencana strategis Tahun 2026 sudah terpenuhi. Namun dibutuhkan konsistensi dalam pencapaian indikator sampai dengan akhir rencana strategis agar indikator tetap terpenuhi. Karena nilai perhitungan indikator tersebut adalah nilai akhir.

5. Terwujudnya Satu Data Pembangunan Kota Pasuruan

Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan merupakan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dengan indikator Persentase data statistik yang terintegrasi. Pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Persentase data statistik yang terintegrasi ditargetkan sebesar 80%. Pada Tahun 2023 Persentase data statistik yang terintegrasi sebesar 83,72%. Dengan perolehan nilai tersebut, tingkat kemajuan indikator ini adalah 104,65%. Sehingga pemenuhan indikator sampai dengan akhir rencana strategis Tahun 2026 sudah tercapai. Namun perhitungan indikator ini adalah nilai terakhir. Sehingga masih diperlukan peningkatan dalam pemenuhan indikator agar capaian indikator sampai dengan akhir rencana strategis dapat terpenuhi sepenuhnya.

3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Persentase Aplikasi yang Terintegrasi	38,46%	-	-
2		Nilai SAKIP SKPD	70,61	83,89	84,17

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase temuan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	-	-
		Persentase Rata-rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	272,36%	-	-
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	39,9	75,40	52,92
4	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,90	2,27	127,75
		Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	4,38	3,45	126,96
5	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	83,72	-	-

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki satu tujuan yaitu integrasi digitalisasi pada pelayanan publik. Pada tahun 2023 indikator tersebut terealisasi 38,46. Namun, capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan nilai perolehan nasional, provinsi, atau kota/kab lain. Karena indikator ini tidak sama dengan indikator nasional. Indikator tujuan Diskominfo Kota Pasuruan ada kesamaan dengan sasaran Kementerian Komunikasi dan informatika yaitu Sasaran: SK.4 Terwujudnya Pemanfaatan Layanan Aplikasi Pemerintahan Pusat Dan Daerah yang Terintegrasi. Akan tetapi, indikator sasaran tersebut tidak sama dengan indikator tujuan Diskominfo Kota Pasuruan. Sehingga indikator persentase aplikasi yang terintegrasi tidak dapat dibandingkan dengan instansi pemerintah dari daerah lain ataupun pusat.

Sasaran pertama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan merupakan sasaran penunjang rencana strategis dinas. Ketiga indikator dari sasaran tersebut merupakan indikator yang dapat di penuhi sekretariat Diskominfo Kota Pasuruan. Sehingga tidak semua daerah memiliki indikator tersebut. Untuk indikator nilai SAKIP SKPD Diskominfo Kota Pasuruan mendapatkan nilai 70,61 dengan kategori BB. Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih sangat kurang. Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah 83,89. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun

2024 Diskominfo akan menggunakan aplikasi dalam pengumpulan capaian indikator kinerja. Selain itu, Diskominfo juga akan menjaga keselarasan antara dokumen perencanaan dan dokumen laporan evaluasi.

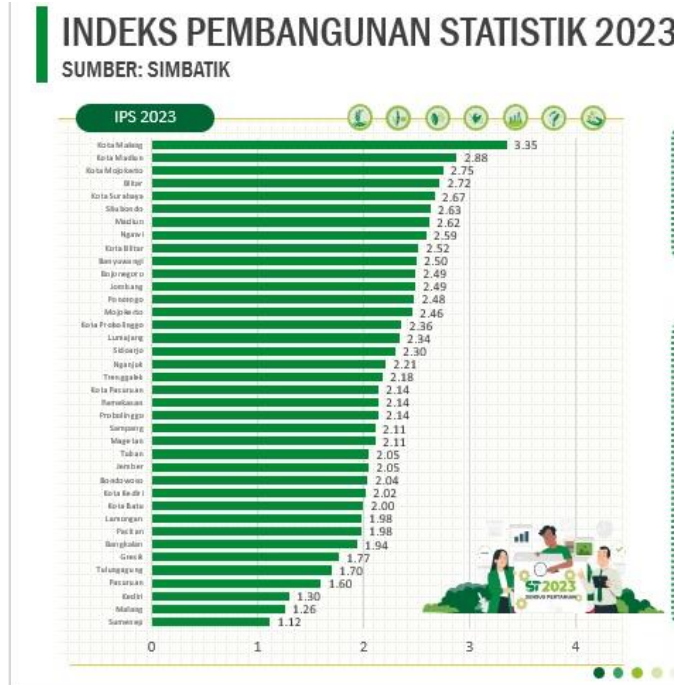
Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2023 merupakan penilaian IKIP secara Nasional untuk pertama kalinya sejak pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang ditandai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Nilai IKIP Kota Pasuruan jika dibandingkan dengan nilai IKIP Nasional dan Provinsi Jawa Timur masih sangat kurang. Nilai IKIP Nasional adalah 75,40 dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai 92,00. Sedangkan Pemerintah Kota Pasuruan mendapatkan nilai sebesar 39,9. Terkait hal tersebut, Diskominfo akan melakukan berbagai rencana aksi pada tahun berikutnya demi peningkatan nilai IKIP. Diskominfo akan lebih intensif dan mendetail dalam monitoring dan evaluasi terkait dengan pengelolaan website dan publikasi informasi pada setiap elemen bidang. Dengan adanya monev tersebut diharapkan Keterbukaan Informasi Publik pada setiap elemen bidang optimal. Selain itu, Diskominfo akan menyusun kebijakan terkait tim pengelola PPID pada Perangkat Daerah dan kebijakan terkait pengecualian dokumen publik.

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Gambar 1 Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kota Pasuruan bahwa nilai domain indeks SPBE Nasional adalah 2,79 dengan rincian domain indeks tata Kelola SPBE Nasional sebesar 2,27 dan indeks layanan SPBE sebesar 3,45. Sedangkan Pemerintah Kota Pasuruan mendapatkan Nilai Indeks SPBE sebesar 3,62 dengan rincian domain indeks tata Kelola SPBE sebesar 2,90 dan indeks layanan SPBE sebesar 4,38. Jika dibandingkan dengan Nilai Indeks SPBE Nasional, nilai Indeks SPBE Pemerintah Kota Pasuruan di atas ambang batas nilai Nasional. Dalam upaya peningkatan Nilai Indeks SPBE Tahun berikutnya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik akan melakukan evaluasi terkait penerapan arsitektur keamanan SPBE dan masterplan SPBE. Dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan kualitas penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Pasuruan meningkat. Selain itu, Diskominfo akan melakukan reviu dokumen pedoman keamanan SPBE dan audit TIK. Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai domain manajemen SPBE.

Sedangkan Data Statistik Nasional dan Provinsi masih dalam tahap Pengembangan dan Sosialisasi. Sehingga capaian indikator persentase data statistik yang terintegrasi tidak dapat dibandingkan. Namun, pada Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mengikuti penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS). IPS adalah Ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral, yang diharapkan dapat mengukur capaian penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral di K/L/Pemda, mendapatkan satu ukuran terpenuhinya prasyarat



Gambar 2 Hasil Penilaian Indeks Pembangunan Statistik 2023

penyelenggaraan SDI dan statistik, sebagai dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SDI dan data statistik di K/L/Pemda, dan untuk menyusun strategi pembinaan data statistik. Pada tahun ini nilai IPS Kota Pasuruan adalah 2,14 berada di urutan ke 20 dari 38 Kab/Kota di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Pasuruan memerlukan evaluasi dan perbaikan atas kekurangan-kekurangan pemenuhan IPS. Dalam hal ini, di tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik akan melakukan Optimalisasi pemanfaatan data pada Aplikasi SIJAJA sebagai sumber data yang telah terverifikasi secara berjenjang pada semua perangkat daerah. Sehingga proses *up dating* aplikasi Satu Data Kota Pasuruan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Bidang statistik juga akan melakukan Optimalisasi layanan Rekomendasi Statistik (Romantik BPS) sebagai sarana penyaluran metode pengelolaan data pada semua perangkat daerah agar sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI). Selain itu, bidang statistik akan melakukan optimalisasi Pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) BPS Tahun 2022 dan 2023 sebagai *database by name by address by NIK* pada aplikasi Satu Data Kota Pasuruan. Sehingga hasil intervensi anggaran yang dilakukan Perangkat Daerah akan selaras dengan publikasi data/indikator yang di rilis oleh BPS. Bidang statistik juga akan menyusun dokumen pedoman penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Pasuruan.

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Persentase Aplikasi yang Terintegrasi	50%	38,46%	76,92	Hal ini disebabkan Diskominfotik pada Tahun 2023 fokus dalam pengembangan aplikasi karena urgensi perangkat daerah untuk mendukung peningkatan nilai IKU daerah	menyediakan aplikasi antrian pembuatan aplikasi (Milea) dan mensosialisasikannya
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP SKPD	70	70,61	100,87	Hal ini disebabkan adanya kesinambungan antara dokumen perencanaan dan dokumen laporan evaluasi	
		Persentase temuan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	Hal ini disebabkan Diskominfotik pada Tahun 2023 tidak ada temuan anggaran	
		Persentase Rata-rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	80%	272,36%	340,45	Hal ini disebabkan karena rata-rata capaian program lebih dari target yang ditetapkan	
3	Meningkatnya Keterbukaan	Indeks Keterbukaan	70	39,9	57	Hal ini disebabkan	Sosialisasi dan Monev

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Informasi Publik				karena ada beberapa Perangkat Daerah yang belum update informasi pada website PPID	keterbukaan informasi publik secara berkala
4	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,7	2,90	107,41	Hal ini dikarenakan adanya Kebijakan terkait SPBE dan adanya masterplan arsitektur SPBE	
		Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,7	4,38	162,22	Adanya komitmen pimpinan masing-masing perangkat daerah terkait	
5	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	65	83,72	128,8	Faktor keberhasilan ketercapaian adalah adanya monev indikator satudata secara berkala	

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Berdasarkan dokumen Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan memiliki 1 tujuan, 1 sasaran penunjang dan 3 sasaran strategis.

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan adalah integrasi digitalisasi pada pelayanan publik dengan indikator persentase aplikasi yang terintegrasi.

Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator tujuan adalah banyaknya permintaan

pengembangan aplikasi yang mendadak dan mendesak. Sehingga pada tahun ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan fokus dalam pengembangan aplikasi.

Sasaran penunjang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan adalah meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima dengan indikator nilai SAKIP SKPD, persentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti dan persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD. **Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator tujuan adalah** pengumpulan indikator capaian kinerja belum menggunakan aplikasi. Sehingga nilai SAKIP Diskominfo belum maksimal.

Sasaran strategis yang pertama yaitu Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator Indeks keterbukaan informasi publik. **Hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran ini adalah** belum terpenuhinya indikator kinerja Keterbukaan Informasi yang ditetapkan oleh Komisi Informasi, baik di PPID utama maupun PPID pembantu.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik akan melakukan :

- Monitoring dan evaluasi lebih intensif dan secara berkala.
- Penetapan kebijakan terkait tim pengelola PPID pada Perangkat Daerah dan kebijakan terkait pengecualian dokumen publik.
- Sosialisasi dan kesepahaman dengan seluruh OPD terkait pentingnya pengarusutamaan informasi publik kepada masyarakat, swasta dan badan publik, bekerjasama dengan media massa.
- Penguatan terhadap peran dan fungsi PPID;
- Kerjasama dengan lembaga-lembaga pengawasan seperti Inspektorat;
- Mendorong percepatan penerapan big data secara terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis digitalisasi.

Sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatkan maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan indikator Indeks Tata Kelola SPBE dan Indeks Layanan SPBE. **Hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran ini adalah :**

- Kurangnya kolaborasi perangkat daerah dalam penerapan SPBE.
- Monitoring dan evaluasi penerapan arsitektur SPBE belum maksimal.

Sasaran strategis yang ketiga yaitu Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan dengan indikator Persentase data statistik yang terintegrasi. Pada tahun 2023 telah tercapai sebesar 128,8%. **Hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran ini antara lain:**

- Pemilihan SDM yang ditugaskan tidak membidangi pengelolaan data statistik sektoral.
- Perubahan indikator dan elemen data dari masing-masing PD.

Diperlukan kebijakan penetapan indikator dan elemen data statistik sektoral. Sehingga indikator dan elemen data yang dikumpulkan tidak berubah-ubah ataupun bertambah.

3.1.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	50	38,46	76,92	22.396.767.978	21.314.966.000	95,17	Kurang Efisien
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	70	70,61	100,87	5.514.738.199	5.109.680.640	92,65	Efisien
		100	100	100				
		80	272,36	340,45				
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	70	39,90	57	4.706.843.799	4.372.913.476	92,91	Kurang Efisien
4	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,7	2,90	107,41	11.830.041.500	11.491.933.514	97,14	Kurang Efisien
		2,7	4,38	162,22				
5	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	65	83,72	128,8	345.144.480	340.438.350	98,64	Efisien

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Pagu anggaran dan realisasi anggaran dikalkulasikan dari subkomponen-subkomponen yang menunjang indikator-indikator kinerja yang ada. Pada Tahun 2023 sasaran meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima memiliki 3 indikator dan capaian ketiga indikator tersebut telah tercapai. Rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 180,44% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 92,65%. Artinya tingkat efisiensi penggunaan anggaran adalah 94,7% atau efisien.

Realisasi sasaran meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik tidak mencapai target. Capaian indikator kinerja sebesar 57% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 92,91%. Artinya tingkat efisiensi penggunaan anggaran adalah -38,6% atau kurang efisien. Berdasarkan data diatas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sudah cukup baik dalam penggunaan dana. Namun, dalam pencapaian target kinerja masih kurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya SDM kehumasan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Sehingga terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum mengelola dan mengupdate website PPID secara berkala untuk peningkatan layanan informasi. Selain itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah melakukan monitoring kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Pada tahun 2023 rata-rata jumlah KIM yang aktif sebanyak 15,17 kelompok dari jumlah total 29 kelompok. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang KIM dan seringnya pergantian pengurus dalam KIM. Selain itu, pada Tahun 2023 ada perpindahan *platform website* dari daerah ke *platform website* dari pusat.

Realisasi sasaran meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah mencapai target. Rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 181,11% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 97,14%. Artinya tingkat efisiensi penggunaan anggaran kinerja adalah 35%.

Sedangkan realisasi sasaran Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan juga telah mencapai target. Capaian indikator kinerja sebesar 128,8% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 98,64%. Artinya tingkat efisiensi penggunaan anggaran adalah 30,6% atau efisien. Capaian ini didukung oleh adanya monitoring dan evaluasi pemenuhan data statistik sektoral secara berkala.

3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini :

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Persentase Aplikasi yang Terintegrasi	76,92					
2	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP SKPD	100,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	134,96	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh adanya pemenuhan kebutuhan penunjang sasaran utama
		Persentase Temuan Anggaran yang ditindaklanjuti	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	125	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh komitmen dan monev berkala dalam pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja tepat waktu
		Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran PD	340,45	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	124,46	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh pemenuhan laporan keuangan yang dilakukan secara berkala
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang	142,86	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh pemenuhan laporan barang yang dilakukan secara berkala

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					tersusun tepat waktu			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	95,24	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh pelatihan kepada SDM IT Diskominfo
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	117,65	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh pemenuhan laporan keuangan yang dilakukan secara berkala
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	117,65	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh pemenuhan pengadaan barang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	117,65	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh pemenuhan kebutuhan penunjang urusan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	140,94	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh pemeliharaan barang milik daerah
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	57	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi PD yang di unggah	47,91	Menunjang	Faktor penghambat capaian kinerja adalah karena kurangnya SDM kehumasan pada masing-masing Perangkat Daerah untuk mengelola dan mengupdate website secara berkala

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media	100,94	Menunjang	Ketercapaian ini didukung dengan kerjasama yang baik dengan media
					Persentase informasi berbasis masyarakat yang dibina	70,69	Menunjang	Hal ini dikarenakan adanya perpindahan website KIM dari portal daerah ke portal pusat
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi pembangunan yang dipublikasikan melalui media massa tepat waktu	121,13	Menunjang	Hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait publikasi
2	Meningkatnya maturitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Tata Kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	107,41	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan aplikasi yang terintegrasi	96,20	Menunjang	Ketercapaian target indikator ini karena meningkatnya integrasi aplikasi dalam mendukung satu data Kota Pasuruan
		Indeks Layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	162,22		Persentase layanan jaringan yang ditindaklanjuti	100	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh kapabilitas SDM IT di lapangan, koordinasi yang baik antara operator pengaduan dengan SDM IT di lapangan, dan berfungsinya SOP layanan pengaduan secara optimal
					Persentase pengamanan	117,65	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh adanya lisensi Firewall sebagai

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					informasi dan dokumen publik			sistem keamanan yang melindungi dokumen publik pada website PD
				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan kerusakan jaringan internet dan server yang ditindaklanjuti sesuai SOP	133,33	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh kapabilitas SDM IT di lapangan, koordinasi yang baik antara operator pengaduan dengan SDM IT di lapangan, dan berfungsinya SOP layanan pengaduan secara optimal
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	133,33	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh kapabilitas SDM Programmer yang memadai
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase layanan keamanan informasi dan persandian	1.666,67	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh adanya lisensi Firewall sebagai sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan internet dan Lisensi SSL untuk melindungi privasi dan integritas data interaksi digital pengguna
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik di lingkungan pemerintah daerah	16,67	Menunjang	Ketercapaian ini dikarenakan kurang lengkapnya data pendukung untuk mengajukan sertifikat elektronik

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	128,48	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang di publikasi	116,23	Menunjang	Ketercapaian ini didukung oleh adanya sinkronisasi data perjanjian kinerja dengan monitoring dan evaluasi capaian kinerja di dalam Aplikasi Pelaporan Jabatan dan Kinerja (Sijaja)
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Data Pokok Pembangunan daerah	100	Menunjang	Hal ini disebabkan karena komitmen yang kuat pada Perangkat Daerah sehingga tingkat keterisian elemen data statistik sektoral semakin meningkat
					Jumlah Jenis Data yang Disusun dalam Profil Pembangunan daerah	100	Menunjang	Hal ini dikarenakan adanya monitoring secara berkala yang dilakukan oleh Bidang Statistik
					Persentase data statistik sektoral yang diunggah di website	135,60	Menunjang	Hal ini dikarenakan adanya monitoring secara berkala yang dilakukan oleh Bidang Statistik

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan

Untuk mendukung keberhasilan kinerja tujuan Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan memiliki 4 sasaran yang didukung oleh 5 program sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Sisem Tata Kelola Yang Baik Dalam Menjamin Pelayanan Prima

Untuk mendukung keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya sisem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan melaksanakan program dan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tingkat keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

- a. Peningkatan nilai SAKIP Diskominfo menjadi 70,61 dengan kategori BB
- b. Temuan anggaran Diskominfo Nihil
- c. Realisasi anggaran Diskominfo sebesar 95,17%

2. Sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Untuk mendukung keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan melaksanakan program dan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Tingkat keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

- a. Kerjasama yang baik dengan media antara lain media online, media sosial, media elektronik, media cetak (Radarbromo, Bhirawa, Disway, dan Memorandum), radio (Radio Ramapati), media online (Wartabromo.com, Kabarpas.com, Bangsaonline.com, JatimNow.com, Nusadaily.com, TribunewsJatim.com, DetiknewsJatim.com, Ngopibareng.com, Merdeka.com, Disway.id, dan Akurat.com), dan TV (Trans7, Inewstv/rcti, Jtv, Arektv). Publikasi informasi dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

- Publikasi melalui media cetak : 88
- Publikasi melalui media online : 1.858
- Publikasi melalui media TV : 25
- Publikasi melalui *website* : 334

- Publikasi melalui instagram : 1.416
- Publikasi melalui *live streaming* : 103
- Publikasi melalui *podcast* : 24

Faktor lain pendukung ketercapaian indikator ini adalah adanya koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait publikasi melalui live streaming Ramapati, podcast, dan medsos (IG). Selain itu, tersedianya papan baca sebanyak 14 titik yang tersebar di Kota Pasuruan.

- b. Meningkatnya kemampuan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam mempublikasikan program-program Pemerintah Kota Pasuruan.

3. Sasaran Meningkatnya Maturitas Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe)

Untuk mendukung keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Maturitas Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan melaksanakan program dan beberapa kegiatan sebagai berikut :

Program : 1. Pengelolaan Aplikasi Informatika

2. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan : - Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

- a. 20 Aplikasi yang telah diintegrasikan oleh Diskominfo Kota Pasuruan dari 52 aplikasi yang direncanakan terintegrasi sampai dengan akhir tahun rencana strategis.
- b. Ada 112 aplikasi yang dikelola oleh Diskominfo Kota Pasuruan
- c. 41 website Perangkat Daerah yang dikelola dan diamankan oleh Diskominfo Kota Pasuruan
- d. Tersedianya infrastruktur jaringan sebanyak 342 titik akses internet sampai ke titik RW di seluruh Kota Pasuruan.
- e. Meningkatnya nilai SPBE Kota Pasuruan.
- f. Meningkatnya nilai evaluasi kota cerdas (*Smart City*) Kota Pasuruan.

4. Sasaran Terwujudnya Satu Data Pembangunan Kota Pasuruan

Untuk mendukung keberhasilan kinerja sasaran terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan melaksanakan program dan beberapa kegiatan sebagai berikut :

Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat Keberhasilan yang dicapai antara lain adalah ketersediaan dokumen statistik yang memuat :

1. Indikator kinerja pembangunan Kota Pasuruan selama tahun 2023.
2. Dilaksanakannya kegiatan pelatihan petugas pengolah data statistik sehingga SDM Perangkat Daerah dapat memilah serta mengunggah data indikator Perangkat Daerah terkait pada website Satu Data Kota Pasuruan secara berkala.
3. Dilaksanakannya kegiatan monitoring secara berkala yang dilakukan oleh Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023, pagu dan realisasi anggaran per program dan kegiatan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.514.738.199	5.109.680.640	92,65
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.126.360	28.620.940	91,95
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.393.310.315	4.034.569.493	91,83
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.581.680	10.426.040	98,53
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.237.740	41.260.580	73,37
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.562.600	216.328.274	98,53
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131.986.200	130.098.000	98,57
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.577.950	254.212.493	93,95
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.355.354	394.164.820	98,21
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.706.843.799	4.372.913.476	92,91
2.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.706.843.799	4.372.913.476	92,91
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	11.721.112.580	11.391.465.546	97,19

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
3.1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.813.853.681	10.571.718.539	97,76
3.2	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	907.258.899	819.747.007	90,35
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	345.144.480	340.438.350	98,64
4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	345.144.480	340.438.350	98,64
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	108.928.920	100.467.988	92,23
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	108.928.920	100.467.988	92,23
TOTAL		22.396.767.978	21.314.966.000	95,17

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja - Fungsional) Desember 2023

Pengukuran pencapaian kinerja anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada DPPA APBD tahun 2023. APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan tahun 2023 sebesar Rp 22.396.767.978,- dan realisasi tahun 2023 Rp 21.314.966.000,- mencapai 95,17%. Pencapaian realisasi anggaran tidak 100% dikarenakan terdapat sisa anggaran belanja pegawai yang tidak bisa direalisasikan dan sisa negosiasi pengadaan barang dan jasa maupun modal.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban kinerja yang telah ditetapkan oleh organisasi dan menjadi salah satu bahan evaluasi atas sasaran yang ingin dicapai dalam dokumen perencanaan strategis 2021—2026. Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2023. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dimitigasi.

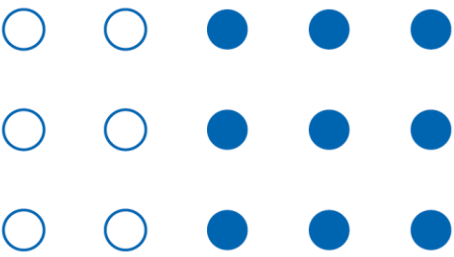
Secara umum dalam mendukung pencapaian sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan pada tahun 2023 mendapatkan alokasi dana APBD sebesar Rp22.396.767.978,- yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 realisasi tahun 2023 Rp21.314.966.000,- mencapai 95,17%. Secara keseluruhan dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan pembangunan, dapat dikatakan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan *Berhasil* menyelenggarakan Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan segenap pemangku kepentingan (Kepala Daerah dan unsur pimpinan di daerah, Dinas/Instansi terkait termasuk seluruh komponen internal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, akuntabel dan inovatif sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan pada periode mendatang.

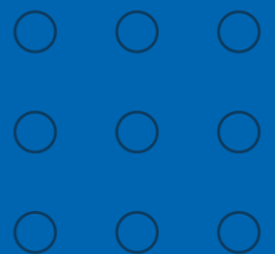
Pasuruan, Februari 2024

Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Pasuruan





LAMPIRAN



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ESELON II
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM SUBEKTI, S.SOS, MM
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SAIFULLAH YUSUF
Jabatan : WALIKOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama


Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
WALIKOTA


SAIFULLAH YUSUF

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK


IMAM SUBEKTI, S.SOS, MM
NIP. 197307091992011001

PERJANJIAN KINERJA**ESELON II**

NAMA : IMAM SUBEKTI, S.SOS, MM
NIP : 197307091992011001
PANGKAT / GOL. : PEMBINA TINGKAT I / IV-B
JABATAN / KELAS JABATAN : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK / 14
PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Nilai PMPRB	70
2	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Persentase aplikasi yang terintegrasi	50
3	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	70
4	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	65
5	Meningkatnya Maturitas Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,7
6	Meningkatnya Maturitas Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,7
7	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP SKPD	70
8	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase Temuan Anggaran yang ditindaklanjuti	100
9	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	80

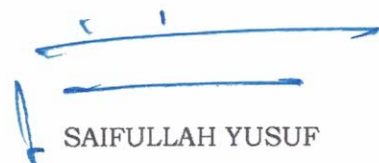
NO	PROGAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Aplikasi Informatika	Rp 11.723.630.686,00	
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 358.144.480,00	
3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 117.219.920,00	
4	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp 4.820.244.473,00	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.370.149.634,00	

JUMLAH

Rp

22.389.389.193,00

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALIKOTA


SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, 31 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK



IMAM SUBEKTI, S.SOS, MM
NIP. 197307091992011001

NO	PROGAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Aplikasi Informatika	Rp 11.723.630.686,00	
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 358.144.480,00	
3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 351.659.760,00	
4	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 4.820.244.473,00	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.370.149.634,00	
JUMLAH		Rp 22.389.389.193,00	

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALIKOTA


SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, 31 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK



IMAM SUBEKTI, S.SOS, MM
NIP. 197307091992011001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ESELON II
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM SUBEKTI, S.SOS, MM
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SAIFULLAH YUSUF
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,
WALI KOTA

SAIFULLAH YUSUF

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK

IMAM SUBEKTI, S.SOS, MM
NIP. 197307091992011001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA : IMAM SUBEKTI, S.SOS, MM
 NIP : 197307091992011001
 PANGKAT / GOL. : PEMBINA TINGKAT I / IV-B
 JABATAN / KELAS JABATAN : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK / 14
 PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
 TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Persentase aplikasi yang terintegrasi	50	50
2	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	70	70
3	Terwujudnya satu data pembangunan Kota Pasuruan	Persentase data statistik yang terintegrasi	65	65
4	Meningkatnya Maturitas Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,7	2,7
5	Meningkatnya Maturitas Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks layanan SPBE terhadap Nilai Indeks SPBE	2,7	2,7
6	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Nilai SAKIP SKPD	70	70
7	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase Temuan Anggaran yang ditindaklanjuti	100	100
8	Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang Baik dalam Menjamin Pelayanan Prima	Persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD	80	80

NO	PROGAM	ANGGARAN				KETERANGAN
		SEBELUM		SESUDAH		
1	Program Aplikasi Informatika	Rp	11.723.630.686,00	Rp	5.514.738.199,00	
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp	358.144.480,00	Rp	4.706.843.799,00	
3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	117.219.920,00	Rp	11.721.112.580,00	
4	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp	4.820.244.473,00	Rp	345.144.480,00	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.370.149.634,00	Rp	108.928.920,00	

JUMLAH	Rp 22.389.389.193,00	Rp 22.396.767.978,00	
--------	----------------------	----------------------	--

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA



SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, 02 Oktober 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK



IMAM SUBEKTI, S.SOS, MM
NIP. 197307091992011001

NO	PROGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.370.149.634,00	Rp 5.514.738.199,00	
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp 4.820.244.473,00	Rp 4.706.843.799,00	
3	Program Aplikasi Informatika	Rp 11.723.630.686,00	Rp 11.721.112.580,00	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 358.144.480,00	Rp 345.144.480,00	
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 117.219.920,00	Rp 108.928.920,00	
JUMLAH		Rp 22.389.389.193,00	Rp 22.396.767.978,00	

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA



SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, 02 Oktober 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK



IMAM SUBEKTI, S.SOS, MM
NIP. 197307091992011001